

TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945



Kasus Ijazah Jokowi Roy Suryo Cs Bakal Hadirkan Bonatua Silalahi

Jakarta, MIMBAR - Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar dan Dokter Tifauziah Tyassuma atau akrab disebut trio RRT bakal menghadirkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dalam lanjutan pemeriksaan saksi dan ahli di Polda Metro Jaya, dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bonatua akan dihadirkan dalam kapasitas sebagai ahli meringankan bagi trio RRT.

Kuasa hukum Roy cs, Refly Harun mengatakan langkah ini diambil setelah Bonatua mendapat salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU RI. Salinan itu diperoleh Bonatua setelah menang dalam proses sengketa di Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Jadi ketebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli, dan Insyaallah Bonatua adalah salah satu ahli yang kami hadirkan. Karena dia kan peneliti, peneliti independen yang memeliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi dan sebagainya kurang lebih," tutur Refly di Polda Metro Jaya, Selasa (10/2).

Refly mengapresiasi langkah Bonatua yang akhirnya berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi setelah menempuh berbagai langkah.

Disampaikan Refly, salinan yang diperoleh Bonatua itu merupakan mirroring dari ijazah yang dilegalisir yang diajukan Jokowi dalam proses pemilihan.

"Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah so-called aslinya, kan begitu. Ijazah so-

■ Bersambung ke Hal 11



Hidayah Taruhan Golkar Sumut 2029

Oleh: Dr. Suheri Harahap, M.Si
Sosiolog Politik UIN SU

Euforia Musda XI Partai Golkar Sumatera Utara telah berakhir. Terpilihnya Andar Amin Harahap secara aklamsasi memang menandai kemenangan demokrasi prosedural. Namun, politik tidak berhenti pada seremoni. Justru setelah palu diketuk, ujian substantif kekuasaan dimulai.

Sebagai akademisi yang melalui politik Sumatera Utara dengan pendekatan sosiologi

■ Bersambung ke Hal 11

Soal Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Istana Pastikan Dibayar Pakai APBN

Jakarta, MIMBAR - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pembayaran kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Iya (utang Whoosh pakai APBN)," ujarnya singkat saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Prasetyo menjelaskan, meski sumber pendanaan telah dipastikan berasal dari APBN, pembahasan teknis pelaksanaannya masih belum final. Proses tersebut

■ Bersambung ke Hal 11

Edisi Digital tersedia di
myedisi



RABU, 11 FEBRUARI 2026
23 SYA'BAN 1447 H

Harga Eceran
Rp. 4000,- (Dalam Kota)
Luar Kota + Ongkos Kirim
Berlangganan Hub. (061) - 7330737
Terbit 12 Halaman | Tahun LXXX No.060

Jelang Lebaran Pemerintah Kucurkan Bansos Rp17,5 T

Jakarta, MIMBAR - Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp17,5 triliun menjelang lebaran. Penyaluran dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal I 2026.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan terdapat dua jenis bansos yang disalurkan dengan sasaran utama keluarga miskin dan rentan.

"Ada dua jenis bansos. Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu bantuan



■ Bersambung ke Hal 11

Kisruh BPJS PBI Pemerintah-DPR Sepakat Selesai dalam 3 Bulan



Jakarta, MIMBAR - DPR dan pemerintah menyepakati untuk menyelesaikan masalah penonaktifan belasan juta peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dalam tiga bulan.

"DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani, dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, membacakan kesimpulan rapat bersama sejumlah menteri membahas isu penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS PBI di kompleks parlemen, Senin (9/2).

■ Bersambung ke Hal 11

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta, Selasa (10/2).

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan perkara

sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, hari ini Penyidik melakukan penggeledahan di kantor dan rumah dinas Ketua PN Depok," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (10/2).

Budi mengungkapkan, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara. Barang bukti tersebut akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi dan tersaksi dalam pemeriksaan.

"Dalam penggeledahan, penyidik di antaranya mengamankan dan menyita beberapa dokumen terkait dengan perkara ini, serta uang tunai senilai

■ Bersambung ke Hal 11



Memanas, Massa AMI Kepung Kantor Wilayah Ditjen PAS Jatim

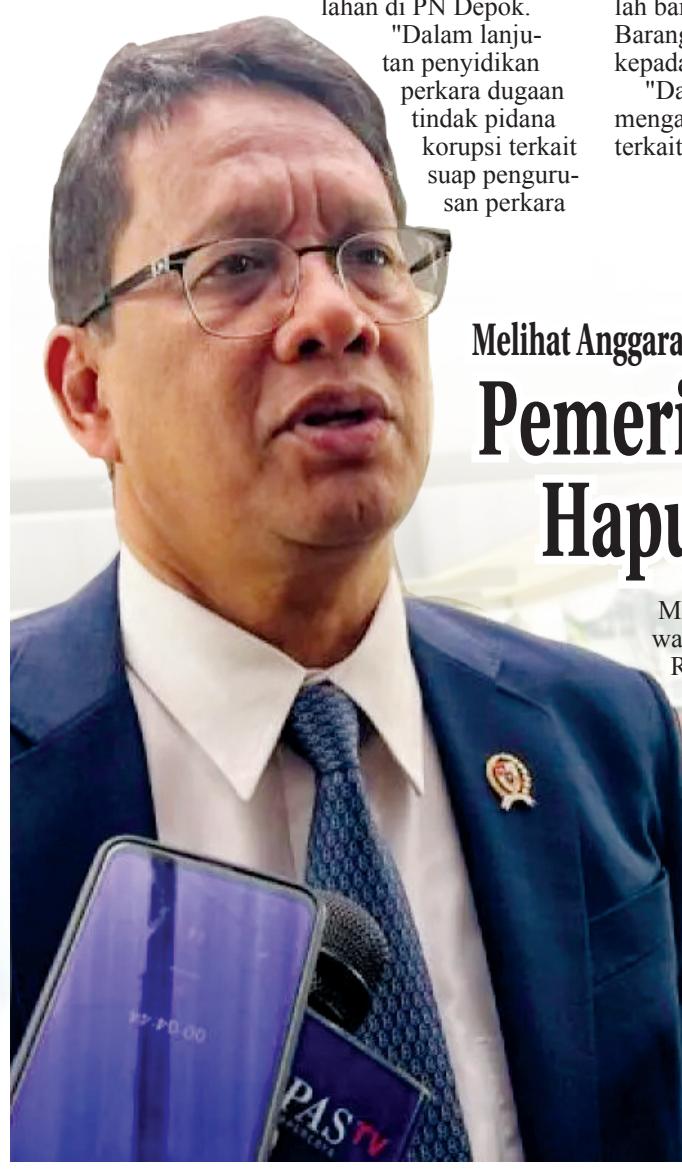
Surabaya, MIMBAR - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi intimidasi di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaran (Ditjen PAS) Jawa Timur pada Selasa (10/2/2026).

Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas kesalahpahaman dan lemahnya kinerja petugas di Lembaga Pemasaran (Lapas) wilayah Jawa Timur.

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan dalam yang mewakili warga Jawa Timur. Ia menilai sistem pengawasan di dalam Lapas saat ini sudah berada di titik yang memprihatinkan atau "bobrok".

Baihaki berpikir bagaimana barang terlarang atau tindakan ilegal bisa terus terjadi di dalam institusi yang memiliki

■ Bersambung ke Hal 11



Melihat Anggaran BPJS untuk Masyarakat Miskin 2026

Pemerintah Berencana Hapus Utang Iuran

MENTERI Keuangan Purnaya Yudhi Sade menekankan bahwa pemerintah menyiapkan Rp247,3 triliun untuk anggaran kesehatan 2026. Jumlah tersebut, termasuk anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Purnaya menyampaikan kalau Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap ekspansif dan berkelanjutan dalam mendukung agenda prioritas, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan

■ Bersambung ke Hal 11



■ Sepakat untuk rakyat...??

■ Cckck